

- 
1. Seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya disebut
- Aturan
 - Undang-Undang
 - Regulasi
 - Pelanggaran
 - Peraturan
2. Undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah
- UU No. 10 Tahun 2011
 - UU No. 12 tahun 2011
 - UU No. 11 Tahun 2011
 - UU No. 15 tahun 2011
 - UU No. 13 tahun 2011
3. Susunan di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di "atas", "bawah", atau "pada tingkatan yang sama" dengan lainnya disebut
- Hierarki
 - Regulasi
 - Pertentangan
 - Norma
 - Oposisi
4. Berikut tata urutan peraturan perundang-undangan yang ke-2 yaitu
- UUD RI 1945
 - Peraturan Presiden
 - Petetapan MPR
 - Perda Kabupaten/Kota
 - Peraturan Pemerintah
5. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat disebut
- Urusan pemerintah absolut
 - Urusan pemerintah konkuren
 - Urusan pemerintah daerah
 - Urusan pemerintah kota
 - Urusan pemerintah daerah
6. Berikut pasal yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah bebas menjalankan otonomi sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing kecuali untuk urusan yang dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat adalah
- Pasal 5 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
 - Pasal 7 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
 - Pasal 6 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
 - Pasal 2 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
 - UU No. 12 Tahun 1945
7. Dalam Pasal 19 yang bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenang pemerintah pusat diselenggarakan adalah

- 
- a. Diselenggarakan oleh pemerintah pusat
b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pusat
c. Diselenggarakan bersama oleh pemerintah daerah
d. Diselenggarakan dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas pembantuan
e. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada instansi lokal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi
8. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat
- a. Khusus
b. Umum
c. Fundamental
d. Menyempit
e. Luas
9. Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan presiden. Peraturan yang dimaksud adalah
- a. UU NRI Tahun 1945
b. Undang-undang
c. Perppu
d. Peraturan pemerintah
e. Peraturan daerah
10. Berikut Urusan Pemerintahan terdapat tiga, yaitu
- a. Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum
b. Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Khusus
c. Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum
d. Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konsumtif, dan Urusan Pemerintahan Umum
e. Urusan Pemerintahan Umum, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Khusus